

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kepada Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pasar Bawah Bukittinggi)

Nama : Betaria Pertiwi

NIM : 2009/12908

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

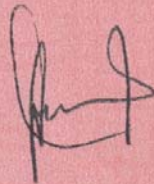
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 April 2014

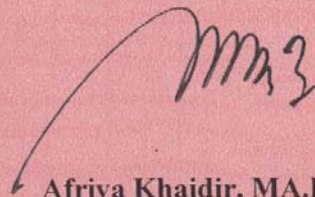
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph. D
NIP. 19640208 199003 2 001

Pembimbing II



Afriva Khaidir, MA.PA, Ph.D
NIP. 19811229 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


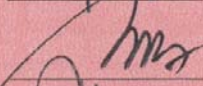
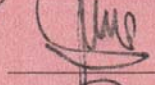


Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, Tanggal 24 April 2014 Pukul 10.00-12.00 WIB

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kepada Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pasar Bawah Bukittinggi)

Nama : Betaria Pertiwi
NIM : 2009/12908
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

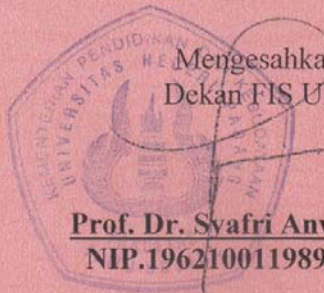
Padang, 24 April 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	
Sekretaris	: Afriva Khaidir, MA.PA, Ph.D	
Anggota	: Drs. Syamsir, M. Si, Ph.D	
Anggota	: Dra. Hj. Jumiati. M.Si	
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP.196210011989031002



ABSTRAK

Betaria Pertiwi: 2009/12908. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kepada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bawah Bukittinggi. Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Padang. 2014.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pemungutan retribusi pasar serta kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi dalam membayar retribusi pasar kepada Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti berusaha untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Informan penelitian adalah Kasi Retribusi, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi, Bendahara Pembantu Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi, pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi, serta pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Bawah Bukittinggi. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui teknik Triangulasi sumber, serta teknik analisis data menggunakan analisa data deskriptif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi kepada pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Bawah Bukittinggi. Berdasarkan temuan dan pembahasan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya serta sikap dari birokrasi dan pelaksana. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar adalah sarana dan prasarana kantor, keterbatasan SDM dan aplikasi pengelolaan keuangan serta kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas umum. Diharapkan kedepannya terdapat peningkatan berupa kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas, serta mampu menampung setiap aspirasi yang diberikan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Bawah Bukittinggi agar target yang diinginkan pemerintah daerah dapat terpenuhi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas kebesaran rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hanya atas izin, rahmat karunia dan petunjuk-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ucapan terima kasih teristimewa penulis haturkan kepada kedua orangtua penulis yang sudah memberikan bantuan doa yang tiada henti-hentinya, perhatian serta kasih sayang yang tiada terkira demi kesuksesan penulis, serta kepada saudara/i penulis yang juga membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

3. Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Afriva Khaidir, S.H, M. Hum, MA.PA. Ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Drs, Syamsir, M.Si. Ph.D, Ibu Dra. Jumiati, M.Si, dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, dan, Ibu Henni Muchtar, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik
6. Bapak Drs, Syamsir M.Si. Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan dorongan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Penasehat akademis penulis Ibu Alia Azmi, S.IP, M.Si yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan surat izin penelitian.
9. Kepala Seksi Retribusi, Evaluasi dan Pengelolaan, Bendahara Pembantu serta seluruh staf pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi serta para pedagang kaki lima yang telah meluangkan waktu, tenaga dan perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman IAN 2009 dan teman-teman dari KSR PMI Unit UNP dan teristimewa untuk angkatan 18 yang telah memberikan bantuan, semangat, kebersamaan dan rasa kekeluargaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak terkait.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	6
3. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	9
1. Konsep Kebijakan Publik	9
2. Konsep Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	16
3. Konsep Pajak dan Retribusi Daerah	20
4. Konsep Retribusi Pasar.....	23
5. Pedagang Kaki Lima Pasar Bawah Bukittinggi	25
6. Konsep Pemungutan	27
a. Syarat Pemungutan Pajak dan retribusi.....	28
b. Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	29
7. Konsep Kendala dan Upaya Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar	31
a. Kendala Pemungutan Retribusi Pasar	31
b. Upaya Pemungutan Retribusi Pasar	32

B. Kerangka Konseptual.....	33
------------------------------------	-----------

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	38
1. Data Primer.....	38
2. Data Sekunder.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	39
2. Observasi	40
3. Studi dokumentasi	40
F. Teknik Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	44
1. Gambaran umum tentang Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi.....	45
2. Wilayah kerja Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi	45
3. Struktur organisasi	46
4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi.....	50
B. Temuan Khusus	52
1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Bawah Bukittinggi.....	52
a. Aparatur pemungutan retribusi pasar	53
b. Fasilitas pemungutan retribusi pasar	55
c. Besar tarif retribusi pasar	56
d. Waktu pemungutan retribusi pasar.....	58

e. Sanksi	60
2. Kendala pemungutan retribusi pasar	61
3. Upaya pemungutan retribusi pasar	66
C. Pembahasan.....	69
a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.....	69
b. Kendala pemungutan retribusi pasar	78
c. Upaya mengatasi kendala.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Penerimaan Retribusi Pasar Bawah Bukittinggi	4
2. Tabel 2. Informan Penelitian	37
3. Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Bawah.....	48
4. Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan Aparatur	48
5. Tabel 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Bawah Bukittinggi	56
6. Tabel 6. Perincian Target dan Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Bawah Bukittinggi tahun 2012	70
7. Tabel 7. Perincian Target dan Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Bawah Bukittinggi tahun 2013	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	34
Gambar 4.1 Struktur Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Bukittinggi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal (keuangan daerah) memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan aspirasi, prioritas dan kebutuhan daerah dengan didukung oleh tata pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Faisal (2002), desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah sebagai konsekuensi logis otonomi daerah. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal seharusnya dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang tidak luput dari berbagai tantangan yang semakin lama semakin sulit. Tata kelola keuangan meliputi antara lain penerapan sistem manajemen, akuntansi keuangan, pengawasan sumber daya manusia dan berbagai unsur-unsur lain yang dapat menunjang pengelolaan keuangan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini menjadi andalan penerimaan, pada suatu saat akan dapat berkurang bahkan habis. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika dieksploitasi secara terus-menerus maka persediaan sumberdaya akan semakin menipis. Sehingga untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya manajemen pengelolaan keuangan yang handal dengan tantangan untuk mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah lainnya tanpa mengorbankan masyarakat.

Dalam meningkatkan jumlah pendapatan, pemerintah perlu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru seperti menciptakan inovasi program ekonomi daerah baik antara pihak pemerintah daerah maupun pihak swasta sehingga di masa mendatang, potensi-potensi dan sumber daya yang tersembunyi dapat dikelola dengan maksimal.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak. Menurut Ahmad (2002), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut oleh daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota guna membiayai sebagian dari keperluan rumah tangganya sendiri.

Pajak berbeda dengan retribusi karena retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati oleh pembayar retribusi.

Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi atas tiga yaitu retribusi jasa umum,

retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan.

Salah satu bentuk retribusi jasa umum adalah retribusi pasar. Pasar merupakan tempat untuk transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli dimana kebutuhan produsen baik sandang, pangan dan papan tersedia secara lengkap. Dengan adanya pasar, perekonomian suatu daerah dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang maksimal bagi kehidupan masyarakat bila dikelola dengan baik.

Pasar Bawah Bukittinggi merupakan salah satu pasar yang diminati oleh masyarakat dari berbagai daerah. Pasar ini lebih mengutamakan menjual barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Dengan diminatinya pasar ini, banyak pedagang kaki lima yang bahkan berjualan di tempat fasilitas umum sehingga menimbulkan kemacetan karena memakan badan jalan. Bahkan sering pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

Pemungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pembangunan. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pengelolaan pasar. Pemungutan retribusi pasar dikategorikan menjadi 2 yaitu pembayaran retribusi pasar harian dan pembayaran retribusi bulanan. Namun pada kenyataannya pemungutan retribusi pasar dirasa kurang maksimal karena banyaknya toko/kios yang kosong sehingga pemungutan

pembayaran retribusi pasar dirasakan kurang optimal dan belum mencapai target yang telah dirancang oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar, terdapat 1940 pedagang pada hari pasar dan 1545 pedagang yang berjualan pada hari-hari biasa di Pasar Bawah Bukittinggi dengan rincian:

Tabel 1. Penerimaan Retribusi Pasar Bawah Bukittinggi:

NO	JENIS PENERIMAAN	POTENSI	
		JUMLAH PETAK	RETRIBUSI (Rp)
1	Toko/Kios	621	307.855.500
2	Lapangan Bulanan	705	150.695.160
3	Lapangan Harian	200	102.720.000
4	Payung	19	14.040.000
	JUMLAH	1545	575.310.660

Sumber: Data Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat kios atau toko-toko yang tidak digunakan oleh para pedagang sehingga fasilitas yang seharusnya menjadi sumber pendapatan menjadi lahan yang terbengkalai. Hal ini disebabkan karena lokasi yang disediakan kurang strategis sehingga pemungutan retribusi pasar menjadi kurang optimal.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi, Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah yaitu Bapak Taufik S.Sos menyatakan bahwa para pedagang telah diberikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan permanen untuk menjual barang dagangan dengan ketentuan harus membayar retribusi kepada daerah. Namun pada kenyataannya banyak pedagang nakal yang berjualan sembarangan dengan memberikan bayaran kepada para preman pasar.

Selain itu, pada saat pembayaran retribusi dilakukan, banyak pedagang yang membayar retribusi tidak tepat pada waktunya sehingga terjadi penunggakan jumlah pembayaran retribusi pasar. Hal ini membuat Dinas Pengelolaan Pasar kesulitan dalam proses pencatatan keuangan dan target yang seharusnya tercapai menjadi tidak terpenuhi. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara dengan Bendahara Penerima Pembantu Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah, yaitu Zurriya Yuswanita, Amd yang mengatakan bahwa terdapatnya kesulitan dalam pemungutan retribusi pasar karena pedagang beralasan tidak punya waktu dan belum ada uang untuk membayar retribusi sehingga terjadi penumpukan tunggakan pembayaran retribusi pasar.

Kesulitan dalam pemungutan retribusi pasar memang menyulitkan pegawai Dinas Pengelolaan Pasar. Namun berdasarkan wawancara dengan ibu Nurmayati (pedagang asal Gadut, Kecamatan Tiltang Kamang) mengeluhkan mengenai kurangnya pengawasan pemerintah daerah termasuk Dinas Pengelolaan Pasar tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan pemungutan illegal:

“Kami mambayia Rp. 1000 tiok hari. Cuma nan mamintak seo, antah urang dinas pasa, antah pareman. Kadang ado laki-laki babadan gadang nan mamintak. Tapi kalau padagang padusi, nyo suruah padusi nan lo nan mamintak. Tu kok takuik kami. Asa lai aman manggaleh bia lah kami bayia” (Kami membayar Rp. 1000 tiap hari. Hanya saja yang meminta, apakah orang dinas pasar, apakah preman. Kadang ada laki-laki berbadan besar yang meminta. Tetapi kalau pedagang perempuan, dia menyuruh perempuan juga yang meminta. Karena itu takut kami. Asalkan ada aman berjualan biarlah kami membayar),
Sumber: Padang Ekspres

Atas dasar inilah penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemungutan retribusi

pasar yang diberikan pemerintah Kota Bukittinggi kepada para pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi dalam menciptakan perekonomian pasar menjadi lebih optimal serta menguntungkan kedua belah pihak.

B. Identifikasi, Pembatasan, Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih banyak kios-kios yang kosong sehingga berefek pada rendahnya retribusi pasar.
- b. Sulitnya melakukan pungutan kepada pedagang kaki lima.
- c. Kurangnya pengawasan Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah terhadap pemungutan illegal kepada pedagang kaki lima.
- d. Belum optimalnya pemungutan retribusi pelayanan pasar.
- e. Retribusi pelayanan pasar belum mencapai target yang diinginkan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan potensi pendapatan daerah.

2. Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah serta keterbatasan dana, tenaga, dan waktu peneliti maka perlu adanya pembatasan masalah tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan pemerintah kota Bukittinggi kepada pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi.

3. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan terperinci, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi kepada pedagang kaki lima?.
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi?.
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar?.

Atas dasar pemikiran diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian **”Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kepada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bawah Bukittinggi”**.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan pemerintah daerah kepada subjek retribusi pasar Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kaki lima sebagai subjek retribusi pasar.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui retribusi pasar pada pedagang kaki lima.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta konsep pelayanan aparatur pemerintahan dalam mengelola pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu, penelitian memberikan masukan sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi serta instansi yang terkait dalam menjalankan kegiatan pemungutan retribusi pasar sebagai balas jasa kepada pedagang kaki lima yang merupakan subjek retribusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Bawah Bukittinggi masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengelolaan Pasar yang baru disahkan tanggal 1 Januari 2014 dan mulai disosialisasikan pelaksanaannya bulan Februari 2014. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah perincian target dan penerimaan retribusi pasar pada tahun 2012-2013 dimana terdapat 65 kios atau toko yang tutup/ tidak mungkin ditagih disebabkan kurang diminati oleh pedagang dalam penyewaan tempat, sehingga pendapatan daerah Bukittinggi yang tidak dapat dipungut berjumlah Rp. 28.950.000 pada tahun 2012 dan Rp. 11.121.000 pada Tahun 2013. Faktor ini juga disebabkan karena masih banyaknya keluhan dari pedagang kaki lima mengenai sarana dan prasarana penunjang yang kurang mendapatkan

perhatian dari pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi sehingga pedagang kaki lima merasa kurang mendapat perhatian baik dalam hal keamanan, kenyamanan serta keselamatan pedagang kaki lima.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kaki lima di Pasar Bawah Bukittinggi adalah kurangnya sarana dan prasana kantor penunjang, keterbatasan SDM dan aplikasi pengelolaan keuangan khususnya retribusi pasar (pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittingg), serta kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam membayar retribusi pasar dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas yang diberikan kepada pedagang kaki lima baik berupa toko/kios maupun sarana atau fasilitas umum.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi dalam meningkatkan kinerja adalah dengan menambah sarana dan prasarana kantor, melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap bangunan berupa toko/kios, memperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana umum, serta membuat kotak saran yang diletakkan di dekat pintu masuk kantor Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pengeloan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi kepada pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Bawah Bukittinggi, maka disini penulis menyarankan, yaitu:

1. Perhatian hendaknya lebih ditingkatkan secara berkesinambungan kepada pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi pasar kepada Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi.
2. Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Bawah Bukittinggi untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan sosialisasi dan pemeliharaan terhadap bangunan yang lebih intensif agar bangunan yang terbengkalai dapat digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah*. Ed,1. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Grafindo.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Ed, ke-9. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada
- Diana Anastasia. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : C.V Andi OFSET
- Dwiwarso Utomo. 2011. *Perpajakan Aplikasi&terapannya*. Yogyakarta : C.V Andi OFSET
- Faisal Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia “Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia”*. Jakarta: Erlangga.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kaho Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN: Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama